

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Cahyani, Indah. (2021). *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2022). *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Karianga, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah: Konsep, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munaf, Yusri. (2016.) *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Raharjo, M. M. (2022). *Sistem Dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi Dan Implementasi*. Depok: Rajawali Pers.

Ramlan & Sihombing. E. N. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.

Ridwan, Juniarso. & Sudrajat, A., S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa

Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soleh, C., & Rochansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sunarso, Siswanto. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga.

Sumber Lainnya

Angsana Liany Dewi Hadi dan Eko Primananda. (2024). Kajian Hukum Terhadap Proses Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kawasan Sumba Barat Daya. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1211–1222. Diakses 10 November 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.20342>

Aswajanews.id. (2025). “Pungli Pelantikan Perangkat Desa Mulyasari Terkuak: Rp 15 Juta Untuk Duduki Jabatan”. <https://aswajanews.id/pungli-pelantikan-perangkat-desa-mulyasari-terkuak-rp-15-juta-untuk-duduki-jabatan/>. Diakses 10 Desember 2025.

Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksun. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2):92-100. Diakses 8 Januari 2026. <https://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka

Bambang Adhi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2 (2), 210-229. Diakses 2 Januari 2026. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

Betha Rahmasari. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 117–132. Diakses 10 Desember 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063>

Ester Nathania Davita Sitanggang, Agustin Widjiastuti dan Dave Tedjokusumo. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat:

- Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Yang Konsisten Dan Terencana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–12. Diakses 6 November 2025. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/533>
- Ika Asmawati dan Prayino Basuki. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63-76. Diakses 8 Januari 2026. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Juwita Arum Mawarni. 2023. Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi). Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Diakses dari https://digilib.uinkhas.ac.id/29313/1/Juwita_Arum_Mawarni_S20193029.pdf
- Marcella J Kapojos, Dani R Pinasang dan Donna O Setiabudhi. (2025). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex et Societatis*, X(1), 47–61. Diakses 1 Desember 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42470>
- Marzelina Hardiyanti dan Amalia Diamantian. (2022). Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8 (1), 334-352. Diakses 3 Januari 2026. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Muhamad Labolo. 2017. Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7 (2), 73-82. Diakses 2 Januari 2026. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42>
- Mohammad Rifan dan Liavita Rahmawati. (2021). Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18, 22–43. Diakses 3 November 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1812>
- Nida Amalia, Hasyimi Muhammad dan Muhammad Khoirul Anwar. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 06(01), 1–15. Diakses 1 Desember 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.195>
- Ombudsman Republik Indonesia. “Menyingkapi Potensi Malaadministrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--menyingkapi-potensi-malaadministrasi-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa--->. Diakses 10 Desember 2025.

- Risna Wendy Wiragandy. (2025). Analysis of the Politicization of Regional Bureaucracy on the Neutrality of State Civil Apparatus Performance. *Journal of Administrative Law*, 6, 22–40. Diakses 11 Desember 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39434>
- Rizal La-nggolu. (2025). Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–16. Diakses 6 November 2025. <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1735>
- Sijaruddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Supriyadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. (2022). Isu F Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 19, 887–908. Diakses 3 November 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Trisulo Trisulo, Budi Susilo, dan Baga Johantri (2024). Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sinduadi, Mlati, Sleman). *Jurnal Education and Development*, 12(3), 451-456. Diakses 8 Januari 2026. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6294>
- Yusuf Aji Purnomo. 2023. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/71615>.